

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Politik adalah dunia laki-laki. Pemahaman itu bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat. Ada kesan yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik bahwa politik itu kotor, keras dan semacamnya. Akibatnya jumlah wanita yang terjun ke dunia politik relatif kecil. Perempuan secara khusus ditempatkan pada suatu wilayah yang a-politis, dipandang sebagai kelompok yang tidak mempunyai kepentingan melainkan hanya sebagai kelompok penjaga moral. Misalnya, bagaimana menjadi ibu dan istri yang baik. Sedangkan kaum laki-laki identik dengan lembaga dan aktivitas di luar rumah.

Perempuan jarang menduduki jabatan politik, sehingga seperti terjadi pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik. Ini berarti terjadi pertentangan antara hak kebebasan yang dimiliki tiap individu sebagai warga negara dengan partisipasi perempuan dimana persamaan kesempatan mengarah pada hal yang dimiliki oleh setiap individu untuk mewujudkan potensi diri mereka untuk menjadi apapun yang mereka harapkan, termasuk keinginan dari kaum perempuan untuk dapat menduduki jabatan politik seperti laki-laki.

Pada masa sekarang ini, seiring dengan majunya zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi, pandangan terhadap kedudukan perempuan sudah mengalami pergeseran. Sehingga memunculkan cita-cita besar yaitu mewujudkan

Dapat kita lihat gerakan perempuan mulai abad XIX-XX.¹ Diawali dengan perjuangan untuk mendapatkan hak pencarian hidup di luar rumah dengan memberikan lapangan pekerjaan dan pendidikan bagi perempuan di Eropa saat revolusi industri. Kemudian pada abad XX mulai muncul gerakan perempuan, terutama perempuan terpelajar yang berhasil meniti karir pada berbagai kehidupan, jenjang jabatan dan kepangkatan bahkan yang tertinggi sekalipun. Seperti keberhasilan Corazon Aquino yang pernah menjadi Presiden Filipina, Margaret Thatcher mantan Perdana Menteri Inggris, Benazir Bhuto dari Pakistan, Begum Khalidazia dari Bangladesh dan Tensu Ciller dari Turki yang pernah menjadi Perdana Menteri di negara mereka masing-masing.²

Perempuan di parlemen tidak dimaksudkan untuk menjadi hiasan perempuan di parlemen diharapkan aktif menyebarluaskan pemahaman gender dan mengupayakan sistem politik yang dapat mengakomodir permasalahan perempuan serta memfasilitasi perempuan yang ingin terjun di dunia politik dengan tujuan memperbaiki, merubah sistem ekonomi, politik dan sosial ke arah yang lebih baik. Hanya dengan kerjasama antar kelompok perempuan dan juga laki-laki, dunia dapat kita rubah ke arah yang lebih baik.

Swedia merupakan negara yang memiliki tingkat yang tinggi dalam hal partisipasi perempuan dalam parlemen yaitu 42,7 persen. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak datang begitu saja. tetapi melalui perjuangan yang cukup panjang. Hingga pada akhirnya hampir 50 persen dari posisi menteri dalam

¹ Siti Muslikhati, *Sorotan Terhadap Strategi Pemberdayaan Politik Perempuan*, Diktat Mata Kuliah: Masalah Dunia Islam, Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004

² Siti Muslikhati, *Sorotan Terhadap Strategi Pemberdayaan Politik Perempuan*, Diktat Mata Kuliah: Masalah Dunia Islam, Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004

pemerintahan Swedia dijabat oleh perempuan. Munculnya perempuan di parlemen Swedia, dirasakan membuat suasana kerja yang lebih baik bagi parlemen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Guthenberg, anggota parlemen perempuan menganggap bahwa banyaknya perempuan telah membuat perubahan bentuk kerja dan iklim diskusi di parlemen dan mereka merasa pekerjaannya menjadi lebih ringan dengan semakin banyaknya kolega perempuan.

Sedikit demi sedikit prestasi dapat diraih oleh anggota parlemen perempuan, tentunya atas kerja sama dengan anggota parlemen laki-laki. Kebijakan-kebijakan baru muncul, kesejahteraan rakyat pun semakin diperhatikan.

Meningkatnya peranan perempuan pada era 60 dan 70-an sedikit banyak telah membantu Swedia menjadi negara dengan sistem kesejahteraan yang terbaik di dunia.

Dengan melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema “ **Keberhasilan Perempuan di Parlemen Swedia Dalam Merealisasikan**

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

Menjelaskan perjuangan panjang kehadiran perempuan dalam percaturan politik Swedia.

Menjelaskan keberhasilan kaum perempuan Swedia dalam merealisasikan konsep negara kesejahteraan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Wilayah Swedia terletak di Semenanjung berbatasan langsung dengan Norwegia di sebelah barat, Finlandia di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Denmark, sebelah tenggara berbatasan dengan laut Baltik dan sebelah barat daya berbatasan dengan laut Utara. Negara ini dibedakan dalam tiga bagian besar yaitu Gotaland atau Gotarika (selatan), Svealand atau Svearika (pertengahan bagian selatan) dan Norrland (meliputi duapertiga daerah utara termasuk Laplandia).³ Luas negara ini adalah 449.963 km². Penduduk beragama Lutheranisme (sebagai agama resmi).⁴

Swedia terdiri dari 21 daerah atau propinsi dan 289 pemerintah kotamadya (*municipalities*). Setiap daerah dikepalai gubernur diangkat pemerintah. Terdapat dewan daerah yang anggotanya dipilih oleh rakyat setempat.

³ A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedia*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal. 1066-1067

Masing-masing dewan mempunyai tanggung jawab tertentu terhadap pendidikan, pengangkutan umum, kesehatan, dan perawatan medik untuk rakyatnya.⁵

Swedia adalah negara monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer. Kerajaan diwarisi secara turun temurun dan hanya oleh turunan laki-laki. Tugas raja sebagai kepala negara lebih bersifat seremonial.

Pada abad ke-18, hanya laki-laki yang mempunyai hak untuk berpartai atau memilih anggota parlemen dan hanya laki-laki yang boleh duduk di sana. Tapi bukan berarti semua laki-laki boleh mempunyai hak pilih. Hak itu masih dibatasi dan tergantung pada berapa banyak pajak yang mereka bayar dan tergantung putusan partai apakah seseorang boleh ikut berpolitik dan mengambil keputusan politik. dan syarat lain yang tidak bisa ditawar adalah ia harus seorang laki-laki yang sudah dewasa.

Perdebatan tentang pemberian hak pilih kepada perempuan dan kesempatan perempuan untuk duduk di parlemen sudah dimulai sejak awal abad ke-18. Baru pada tahun 1862 dibuat sebuah reformasi di tingkat daerah, sehingga beberapa orang perempuan bisa memperoleh hak pilih. Hanya saja masih dibatasi pada : perempuan dewasa dan belum menikah, mempunyai pendapatan dan dalam tingkat tertentu harus memiliki sejumlah kekayaan pribadi.

Citra dunia politik selama ini boleh dikatakan memang menyeramkan untuk perempuan. Keras, adu strategi, dekat dengan kelicikan dan kemunafikan serta memakai topeng-topeng untuk mengelabui lawan-lawan politiknya. Tapi bukan berarti perempuan tidak bisa ikut berpartisipasi didalamnya. Dunia politik

adalah sebuah jalan untuk menyuarakan kepentingan rakyat, termasuk perempuan. Minat politik dari kaum perempuan juga sangat mendukung mereka untuk dapat diterima di parlemen bukan hanya memperoleh hak pilih. Anggapan bahwa dunia politik adalah dunia yang kotor, telah mempengaruhi kaum perempuan untuk beranggapan bahwa mereka hanya pantas melakukan tugas domestik saja.⁶ Itulah yang dilakukan oleh para perempuan Swedia saat itu. Mereka kurang gesit untuk memperjuangkan haknya untuk duduk di parlemen. Sehingga banyak anggota parlemen beranggapan bahwa perempuan cukup diberi hak pilih dan bukan duduk di parlemen.

Pada awalnya perempuan Swedia yang masuk ke parlemen juga terus menerus dilecehkan. Bentuk pelecehannya seperti: apabila sedang bicara dianggap tidak penting dan *non-issue*, lebih mengomentari penampilan bukan isi kepala, atau bahkan ditertawakan dan diteriaki. Swedia 20 tahun yang lalu, kulturenya sama dengan Indonesia. Perempuan ditempatkan pada bagian domestik; mencuci, memasak, mengurus anak. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, didukung dengan pertumbuhan ekonomi dan pesatnya perkembangan industri Swedia, perempuan berhasil duduk di parlemen bahkan jumlahnya semakin meningkat. Banyak prestasi yang berhasil diraih oleh perempuan yang berada di parlemen. Terutama dalam bidang sosial.

Perwakilan perempuan di sektor publik sebagai sesuatu yang dapat mengubah kondisi para perempuan itu sendiri dan juga alat untuk meningkatkan

membuat perempuan menjadi aktor bukan korban. Perempuan jadi terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan sistem kesejahteraan di Swedia, mulai dari kebijakan di bidang pendidikan hingga kebijakan bursa tenaga kerja.

Pada tahun 2002 partisipasi perempuan di parlemen mencapai 45% (tertinggi di dunia) dan posisi Perdana Menteri lebih sering dijabat perempuan daripada pria. Kehadiran perempuan di pemerintahan, dengan pengalaman spesifik mereka di sektor domestik, berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ibaratnya, mereka akan menyeimbangkan alokasi sumber daya yang terbatas misalnya berapa dibelanjakan untuk beras (kesejahteraan) dan untuk meriam (gengsi). Keberadaan perempuan akan membantu menemukan solusi konkret untuk perbaikan sistem kesejahteraan.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka pokok permasalahannya adalah **“Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perempuan di parlemen Swedia dalam merealisasikan konsep negara kesejahteraan”**.

E. Kerangka Dasar Teori

Kata “teori” berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat atau memperhatikan. Dari pengertian ini bisa dikatakan bahwa teori adalah suatu pekerjaan yang mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang terjadi. Menurut

Mochtar Mas'ood teori adalah bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan "mengapa", artinya berteori adalah upaya memberikan jawaban pada sebuah fenomena yang terjadi, atau dapat juga dikatakan bahwa teori adalah sebuah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis dimana teori berwujud sekumpulan generalisasi yang didalamnya terdapat konsep-konsep. Dari penjabaran tersebut di atas dapat dikatakan bahwa teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan suatu fenomena tersebut secara ilmiah.⁷ Sedangkan suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek atau suatu fenomena tertentu.⁸

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan yang diharapkan bisa memberi gambaran tentang fenomena yang sudah diutarakan di depan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah :

1. Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori ekonomi pasar murni dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith (1723-1790) yang kelak disebut sistem kapitalisme yang terdesentralisasi karena negara atau pemerintah sama sekali tidak tertarik untuk mengaturnya. Jika setiap orang dibiarkan untuk mengejar kepentingan masing-masing maka tanpa disadari keinginan setiap orang akan terpenuhi dengan sendirinya dan akan tercapailah kesejahteraan umum. Namun dalam kenyataan ada jurang besar antara teori dan

praktek. Banyak sekali halangan terwujudnya kesejahteraan umum melalui pengejaran kepentingan perorangan.⁹

Ketidakmampuan sistem kapitalisme murni ala Adam Smith untuk mewujudkan kesejahteraan umum melahirkan sistem tandingannya yaitu sistem kapitalisme yang diatur dan dipimpin negara dan disebut *State Capitalism* sebagaimana diusulkan oleh Friedrich List (1786-1846).

Model kapitalisme negara ini selanjutnya disempurnakan dalam bentuk model kapitalisme dari Adolf Wagner yaitu *Welfare State* atau sistem kapitalisme dengan pengaturan alokasi dana-dana pemerintah untuk mengadakan redistribusi kekayaan nasional. Model kapitalisme ini selanjutnya disempurnakan oleh J.M Keynes (1936) yang di kenal dengan nama sistem ekonomi campuran (*Mixed Economy*).¹⁰

Negara kesejahteraan adalah negara yang memperbolehkan adanya hak milik dan kebebasan berusaha tetapi yang melakukan campur tangan dan program-program yang luas untuk menghilangkan atau mengurangi efek-efek negatif dari sistem "bebas berusaha". Dalam negara semacam ini kesejahteraan masyarakat diutamakan tanpa menghilangkan kebebasan-kebebasan individu.¹¹

Menurut Charles I Schotland mengemukakan bahwa negara kesejahteraan adalah negara demokrasi Barat yang modern dimana kekuasaan negara dengan sengaja digunakan untuk membatasi kebebasan yang dimainkan oleh kekuasaan ekonomi dan politik agar dapat mencapai redistribusi hasil

⁹ Murbyanto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000 hal 3-4

¹⁰ *ibid*

¹¹ Boediono, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta, 1982 hal 177

pendapatan. Harold. L. Wilensky mengatakan bahwa ada dua macam implikasi bagi kebijakan umum yang di kenal secara luas, yakni:

1. Negara kesejahteraan berarti redistribusi hasil pendapatan.
2. Menekankan pada adanya persamaan kesempatan bagi generasi muda.¹²

Pembahasan tentang negara kesejahteraan dikemukakan menurut Dr. J. Verkuyl seorang ahli teologi:

1. Welfare bukanlah monopoli negara dan oleh karena itu bukanlah tugas eksklusif negara. Suatu negara 'welfare' yang sehat dan sejati, bukan suatu negara yang totaliter melainkan suatu negara yang menolong warga negaranya mencapai kemakmuran yang setinggi-tingginya dengan jalan menciptakan syarat-syarat guna perkembangan kemakmuran oleh semua orang bagi semua orang.
 2. Welfare state yang sejati menghargai kemerdekaan dan menghargai inisiatif swasta. Welfare state membatasi kemerdekaan warganegaranya sejauh diperlukan untuk kepentingan keadilan tetap serentak melindungi pula kemerdekaan dan inisiatif warga negaranya sebanyak mungkin.
 3. Welfare state yang sejati menunjukkan kerelaan serta minat yang besar kepada kerja sama dengan semua badan-badan, perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi yang bertujuan memajukan
-

kemakmuran rakyat dan ia tidak merintangai inisiatif kreatif bagi warga negaranya, tetapi justru menganjurkan, karena kemakmuran bukanlah suatu monopoli negara, melainkan suatu hal yang menuntut inisiatif, tanggung jawab kerja sama semua orang.¹³

Welfare state di Swedia disusun dan dibangun oleh partai Sosial Demokrat. Pembangunan welfare state ini dimulai pada pertengahan tahun 1930. Welfare state di Swedia dibangun berdasarkan pada gagasan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, pelayanan keluarga, jaminan hari tua (pensiun) dan kepentingan sosial lain dengan tanpa melihat besar kecilnya jumlah pendapatan seseorang.

2. Teori Sistem Politik

Secara umum sistem dipahami sebagai perangkat unsur yang terdiri dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya yang saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas.¹⁴

Gabriel Almond menyatakan bahwa,.....” the political system is that system of interactions to be found in all independent societies which performs the functions of integration and adaptation (both internally and vis-à-vis other societies) by means of the employment, or threat of employment, of more or less legitimate physical compulsion”. Pendapat yang dikemukakan oleh Almond ini menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi

¹³ ibid

di dalam masyarakat yang merdeka. Dari pernyataan ini dapat kita tarik suatu pengertian bahwa di dalam masyarakat yang tidak atau belum merdeka tidak terdapat sistem politik dari masyarakat tersebut, yang ada adalah sistem politik dari masyarakat atau negara yang menjajah atau menguasainya. Lebih lanjut dinyatakan oleh Almond bahwa sistem politik menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik adalah untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan., baik terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat lainnya. Demikian pula dengan dalam menyatakan pendapatnya Almond mempergunakan istilah “more of less” (sedikit banyak) yang mengikuti kata “legitimate” (sah) ; hal ini adalah untuk menerangkan paksaan fisik yang dilakukan oleh sistem politik. Di mana dalam hal ini paksaan fisik yang dilakukan oleh sistem politik keabsahannya diragukan. Keragu-raguan mengenai keabsahan paksaan fisik itu terutama ditujukan kepada sistem-sistem politik yang totaliter, dan segala macam bentuk kekuasaan pemerintahan yang lainnya yang tingkat keabsahannya di dalam mempergunakan paksaan fisik diragukan. Oleh Almond dimaksudkan bahwa dengan mempergunakan istilah “more and less” maka segala macam bentuk atau jenis sistem politik dapat dimasukkan atau ditampung dalam batasan tersebut.

Dalam bukunya yang berjudul *The Politics of the Developing Areas*,

Almond menyatakan bahwa di dalam sistem politik terdapat empat macam ciri

atau karakter. Ciri-ciri sistem politik menurut Gabriel A. Almond adalah sebagai berikut¹⁵ :

1. Semua sistem politik memiliki struktur politik.

Dengan suatu pengertian bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhana pun, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yang terdapat di dalam masyarakat yang paling kompleks. Tiap-tiap tipe struktur politik dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya menurut tingkat dan bentuk strukturnya.

2. Fungsi-fungsi yang sama muncul dalam seluruh sistem politik.

Semua sistem politik, baik yang sudah modern maupun yang yang masih primitif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda-beda yang disebabkan oleh karena perbedaan struktur. Demikian pula dapat diperbandingkan bagaimana fungsi-fungsi dari sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara melaksanakannya.

3. Seluruh struktur politik adalah multi fungsional.

Semua sistem politik, baik yang terdapat di dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang terdapat di masyarakat yang masih primitif, betapapun terspealisasikan tetap mempunyai sifat multi fungsional (menjalankan beberapa/ banyak fungsi). Sistem politik dapat dibandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi di dalam struktur itu.

¹⁵ Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 7

4. **Seluruh sistem politik bercampur dengan pengertian budaya.**

Semua sistem politik adalah merupakan sistem “campuran” apabila dipandang dari pengertian kebudayaan. Dalam pengertian yang rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang modern, dan dalam pengertian yang tradisional tidak semuanya primitif. Perbedaan yang terdapat hanya bersifat relatif saja, dan keduanya (hal-hal yang bersifat modern dan tradisional) bercampur satu dengan yang lainnya.

Dalam pembahasan ini, akan lebih difokuskan pada kajian struktur politik dan kebudayaan politik.

a. Struktur Politik

Untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatannya, suatu sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur seperti, parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Masing-masing struktur mempunyai fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan.¹⁶

Masing-masing struktur politik menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi sosialisasi politik, yaitu fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif dan judicial tertentu. Fungsi rekrutmen politik, yaitu fungsi penaseleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan.

¹⁶

Fungsi komunikasi politik, yaitu jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Struktur politik Swedia mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Sosialisasi politik dilakukan dengan memberikan pemahaman politik khususnya kepada perempuan Swedia. Rekrutmen politik terhadap perempuan dilakukan dengan memberikan peluang untuk memilih wakilnya di parlemen atau memberikan kuota kepada perempuan untuk bisa duduk di parlemen. Komunikasi politik di Swedia khususnya terhadap perempuan juga berjalan dengan baik. Ini terbukti dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik meliputi partisipasi dalam parlemen, partai politik maupun kelompok kepentingan.

b. Kebudayaan Politik

Almond memperkenalkan konsep budaya politik, yang tidak sama dengan budaya umum dan juga tidak berlangsung bersamaan dengan sistem atau masyarakat tertentu. Bagaimanapun juga, budaya politik berhubungan pula dengan sistem politik, karena setiap budaya politik melekat dalam pola-pola orientasi tertentu dari tindakan politik, dan pola-pola tersebut biasanya meluas melebihi batas-batas sistem politik.

Untuk memahami politik di setiap negara, maka perlu dipahami kebudayaan di mana politik tersebut berada. Termasuk di dalamnya untuk mengetahui partisipasi politik warga negara dari suatu negara, maka perlu di ketahui bagaimana kebudayaan di negara tersebut dapat memberi pengaruh

terhadap seluruh aspek kehidupan. Membicarakan tentang budaya politik, tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi politik.

Partisipasi didefinisikan sebagai ikut sertanya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar.¹⁷ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai “Kegiatan warganegara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”.¹⁸ Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti, mengikuti kegiatan pemilihan, melobi pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat, mengikuti kegiatan organisasi, mencari koneksi (*contacting*) dan tindak kekerasan.¹⁹

Menurut Gabriel A. Almond, bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Pertama*, bentuk “konvensional” yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. *Kedua*, bentuk “non konvensional” yaitu termasuk beberapa yang mungkin legal maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Di bawah ini tabel yang menunjukkan macam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu.²⁰

¹⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 479

¹⁸ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Alih Bahasa : Sahat Simamora, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 6

¹⁹ Ibid, hal. 17

²⁰ Gabriel A. Almond, *Perbandingan Sistem Politik*, Editor : Mochtar Mas'oeed dan Colin Macandrews, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal. 45-47

Tabel 1.1
Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian suara (voting) • Diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Demonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) • Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) • Perang gerilya dan revolusi

Sumber : Gabriel A. Almond, *Perbandingan Sistem Politik*, Editor Mochtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrews, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal. 45-47

Perempuan Swedia mendapatkan hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik pada tahun 1862. Namun hanya sebatas memberikan suara dalam pemilihan umum bukan untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Pada tahun 1919,

perempuan Swedia baru mendapatkan haknya untuk duduk di parlemen. Prosentase perempuan di parlemen semakin lama semakin meningkat. Berikut beberapa alasan / motif perempuan Swedia aktif di politik :

- a. Keinginan untuk bisa mendapatkan hak-hak yang sama sebagai warga negara. Meskipun ide tentang partisipasi perempuan dalam politik di pelopori oleh seorang anggota parlemen laki-laki, perempuan juga sangat antusias menerima serta memperjuangkan usulan itu. Kesadaran mengenai persamaan hak mulai tumbuh. Memilih adalah sebuah hak yang harusnya diberikan kepada setiap manusia. Berpartisipasi dalam politik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan mengubah kondisi perempuan. Perjuangan hak-hak politik perempuan mulai dan terus menerus dilakukan.
- b. Keinginan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang ada, terutama menyangkut kebijakan tentang perempuan dan kesejahteraan. Dengan ikut berpartisipasi dalam politik, perempuan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan mengenai hal tertentu.
- c. Ketertarikan terhadap program-program tentang perempuan yang dibuat oleh partai-partai politik yang ada di Swedia, dimana partai-partai tersebut berjanji akan memperjuangkan hak-hak perempuan.
- d. Kesadaran dari perempuan Swedia bahwa sebagai perempuan mereka bisa membawa perubahan dalam bentuk kerja dan iklim baru di parlemen.
- e. Meningkatnya gelombang gerakan-gerakan perempuan di negara-negara lain, juga mempengaruhi peningkatan partisipasi politik perempuan Swedia.

Isu-isu yang berkembang saat itu, menyadarkan mereka bahwa sebagai perempuan mereka juga bisa menyampaikan pendapatnya dengan ikut berpartisipasi dalam politik.

Meskipun harus melalui perjuangan yang cukup panjang, perempuan Swedia akhirnya mendapatkan haknya untuk memberikan hak pilih, kesempatan untuk membentuk organisasi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sampai pada akhirnya, keberadaan perempuan dalam parlemen Swedia memberi pengaruh besar dalam setiap pengambilan kebijakan.

Untuk bisa diperhitungkan sebagai pemimpin, perempuan harus bekerja lebih keras dari pada kolega prianya di lingkungan manapun, di dunia politik jabatan yang ditempati laki-laki menyulitkan perempuan untuk bisa terpilih (kesulitan yang tidak dialami para kandidat laki-laki). Jelaslah lebih sulit bagi perempuan untuk bisa berhasil dalam dunia politik dibandingkan laki-laki. Perempuan harus selalu membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan.

Budaya politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu.²¹ Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya, atau dengan kata lain budaya politik seseorang dapat digolongkan menjadi tiga.

Pertama, orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara dan memperoleh informasi cukup

²¹ G. A. Alford, *11. Sistem Politik Berdasarkan Sifat Simpati, Liberty*

banyak tentang kehidupan politik disebut budaya politik partisipan. Kedua, orang-orang yang secara pasif patuh kepada pejabat-pejabat pemerintah dan Undang-undang tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan disebut budaya politik subyek. Ketiga, orang-orang yang sama sekali tidak menyadari dan mengabaikan adanya pemerintahan politik. Mereka ini mungkin buta huruf, tinggal di desa terpencil, atau nenek tua yang tidak tanggap terhadap hak pilih dan mengungkung diri dalam kesibukan keluarga disebut budaya politik parokial.²²

Pada budaya politik partisipan, seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya dan dapat merealisasikan serta menggunakan hak serta menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, tunduk terhadap keadaan, tidak lain karena ia adalah salah satu mata rantai aktif dari proses politik. Dengan demikian seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input output maupun posisinya sendiri.

Pada budaya politik parokial, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas kecuali dalam batas tertentu yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit.²³

Uraian di atas tidak merupakan gambaran sepenuhnya, karena dalam kenyataannya akan dijumpai bentuk-bentuk budaya politik yang tidak homogen, dalam arti hanya terikat pada salah satu klasifikasi. Misalnya dalam budaya politik partisipan masih dijumpai individu yang bahkan tidak sadar akan fungsinya

²² op.cit hal 42

sebagai peserta, tetapi hanya menundukkan diri tanpa alasan, dorongan serta motivasi yang kuat terhadap keharusan yang ada.

Oleh karenanya beralasan apabila Almond atas dasar tiga bentuk dasar tersebut menarik kesimpulan adanya budaya politik campuran.

1. Kebudayaan subyek-parokial
2. Kebudayaan subyek-partisipan
3. Kebudayaan parokial-partisipan

Perempuan Swedia pada awalnya hanya merupakan bagian dari warga negara yang hanya tunduk terhadap keadaan karena mereka tidak bisa mempengaruhi sistem. Namun seiring dengan perjuangannya untuk berpartisipasi dalam politik, kebudayaan politikpun berubah. Pada akhirnya mereka menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Keasadaran tersebut yang pada akhirnya juga akan memabawa dampak baik bagi kepentingan perempuan sendiri.

Hubungan antara budaya politik dan struktur politik adalah sangat memberikan pengaruh besar kesuksesan suatu sistem politik. Tingginya partisipasi politik perempuan Swedia sangat didukung oleh struktur politik yang ada. Tingginya budaya politik partisipan di swedia, ditunjukkan dengan keadaan masyarakat yang sangat kritis terhadap isu-isu tertentu dan keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih baik dari suatu keadaan. Dalam hal kesejahteraan misalnya. Keinginan untuk memperbaiki kesejahteraan seluruh rakyat Swedia, perempuan khususnya mendapat tanggapan positif dari struktur politik sebagai bagian terpenting dari sistem politik Swedia.

Partai politik dan kelompok kepentingan sebagai input, mampu memberikan dukungan-dukungan atau permintaan atas situasi yang ada guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sistem politik Swedia sangat mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Demikian juga dengan program-program menyangkut kesejahteraan rakyat. Output yang dihasilkan dari bekerjanya sistem politikpun mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan penting bagi kesejahteraan masyarakat Swedia.

F. Hipotesa

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan perempuan diparlemen Swedia dalam merealisasikan konsep negara kesejahteraan adalah:

Budaya politik dan struktur politik Swedia

Budaya politik dan struktur politik Swedia yang saling mendukung dan saling mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan. Struktur politik yang ada sangat merespon budaya politik yang berkembang.

Budaya politik yang tercermin melalui tingginya partisipasi politik perempuan Swedia mampu menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan mengenai kesejahteraan melalui parpol atau kelompok kepentingan yang ada kepada badan-badan atau lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan. Kebijakan yang dihasilkanpun mampu menjawab atau menanggapi kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat dalam bidang kesejahteraan.

Partisipasi perempuan dalam sektor publik telah memberikan efek terhadap bentuk sistem kesejahteraan di Swedia.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimulai dari tahun 1994 sampai tahun 2002.

Karena hasil pemilu saat itu (1994) menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan, yang sebelumnya mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2002, partisipasi perempuan berada pada titik tertinggi yaitu 45%.

Namun tidak menutup kemungkinan digunakannya data-data dari tahun-tahun sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) buku, jurnal, internet dan literatur lainnya.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, kerangka dasar teori, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Mendeskripsikan tentang kondisi umum perempuan Swedia, sistem politik Swedia, dan representasi perempuan dalam parlemen.

BAB III : Mendeskripsikan fakta-fakta keberhasilan perempuan di parlemen swedia dalam merealisasikan sistem negara kesejahteraan.

BAB IV : Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perempuan di parlemen swedia dalam merealisasikan sistem negara kesejahteraan.

BAB V : Kesimpulan

Dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN